

PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMALANREA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA MAKASSAR

THE ROLE OF COMMUNITY EMPOWERMENT INSTITUTIONS AT TAMALANREA DISTRICTS IN REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING IN MAKASSAR CITY

Zaenal Akhmad¹
Universitas Pejuang
RI Makassar,
Indonesia¹
email:
zaenalakhmad64@gmail.com

Rahman²
Universitas Pejuang
RI Makassar,
Indonesia²
email:
doktorrahman39760@gmail.com

Rudy Santosa³
Universitas Pejuang
RI Makassar,
Indonesia³
email:
santosarudy077@gmail.com

JGPI
p-ISSN: 2774-907X
e-ISSN: 2775-0140
Vol. 2, No. 1, pp. 15-27
April 2022

 Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tamalanrea serta faktor-faktor yang berpengaruh dalam optimalisasi kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan metode survey. Populasi penelitian adalah keseluruhan komponen yang menjadi objek penelitian dengan teknik penarikan sampel secara purposive. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner, observasi, study kepustakaan dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan studi pustaka dalam penelitian ini dijadikan sebagai data sekunder, sedangkan data yang diperoleh dari kuisioner dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan program SPSS. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dengan skor rata-rata 2,95. Secara umum tingkat responsif dan akuntabilitas sudah berjalan dengan baik namun dari segi kualitas perencanaan dan produktivitas pengurus LPM masih rendah jika dibandingkan dengan akuntabilitas dan responsif. Faktor profesionalisme pengurus LPM, akurasi data dan informasi, sarana dan prasarana, koordinasi dan motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pengurus LPM dimana nilai r hitung lebih besar dari r tabel, yakni nilai $\text{Sig.F} = 0.000 < 0.05$ ini berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. r hitung sebesar 0,740 dan r tabel sebesar 0,227.

Kata Kunci: Peranan, Pemberdayaan, Perencanaan, Pembangunan

Abstract: This study aims to determine and analyze the role of Community Empowerment Institutions in Tamalanrea District and the influencing factors in optimizing the performance of Community Empowerment Institutions in Tamalanrea District, Makassar City. The type of research used is descriptive quantitative with survey method. The research population is the entire component that is the object of research with a purposive sampling technique. Data collection techniques used in this study were questionnaires, observation, literature study and documentation. The data that has been collected through observation, documentation and literature study in this study were used as secondary data, while the data obtained from the questionnaire were analyzed quantitatively using the SPSS program. Based on the results of the research that the role of Community Empowerment Institutions has been going well, this can be seen with an average score of 2.95. In general, the level of responsiveness and accountability has been going well, but in terms of planning quality and productivity of LPM management, it is still low when compared to accountability and responsiveness. The professionalism of LPM management, accuracy of data and information, facilities and infrastructure, coordination and motivation significantly influence the performance of LPM management where the value of r is greater than r table, namely the value of $\text{Sig.F} = 0.000 < 0.05$, this means H_a is accepted and H_0 is rejected. r count is 0.740 and r table is 0.227.

Kata Kunci: Role, Empowerment, Planning, Development

PENDAHULUAN

Salah satu hal yang mempengaruhi pembangunan nasional saat ini adalah perubahan paradigma pemerintahan dari *government* ke *governance* yang membawa implikasi luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pola pelayanan publik. Jika selama ini pemerintah yang banyak mengambil prakarsa dalam urusan pelayanan publik dan pemerintahan, maka dengan pola baru ini prakarsa itu bertumpu pada tiga pilar utama yakni, pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat.

Dalam konsep *governance*, peran pemerintah yang tadinya menjadi aktor utama dalam pembangunan dan penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi masyarakat dan pihak swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut. Hal tersebut juga termuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang disebutkan bahwa salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif ini dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan ini untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif mencapai tujuan, jika dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab sehingga antara masyarakat dan aparat pemerintah tumbuh semangat untuk bekerja sama. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat antara lain melalui pendidikan. Masyarakat dibekali pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan, sehingga masyarakat menjadi tahu, mengerti, dapat melakukan dan mau melakukan sesuatu untuk peningkatan kualitas hidup. Perubahan perilaku ini apabila dipadukan dengan sumber daya alam yang tersedia, akan melahirkan perilaku baru yang disebut partisipasi. Partisipasi ini akan merangsang masyarakat lebih aktif dan kreatif melaksanakan pembangunan yang terarah dan berencana terutama dalam meningkatkan pendapatan serta membuka lapangan kerja baru untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Melalui pelatihan perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat yang diadakan badan pemberdayaan masyarakat disimpulkan bahwa masyarakat tidak akan mau berpartisipasi di dalam program pembangunan masyarakat, kecuali mereka dapat memperoleh apa yang mereka inginkan. Karena itu, tugas utama dari mereka yang bertanggung jawab di dalam program pembangunan masyarakat ialah mengidentifikasi

kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Masyarakat juga perlu dibantu untuk mengadakan penilaian yang terbaik bagi mereka, tentang apa yang menjadi kebutuhan mereka termasuk bagaimana menjadikan mereka memperoleh kepuasan. Yang paling penting adalah bagaimana mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan yang belum mereka rasakan dan memiliki rasa sadar akan pentingnya rasa kepuasan bagi mereka. Pemerintah daerah melalui aparatnya dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab pemberdayaan masyarakat, karena mereka adalah orang-orang yang paling memahami potensi wilayah, permasalahan wilayah, aspirasi masyarakat, kemampuan masyarakat, dan sumber-sumber yang dimiliki daerah baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya.

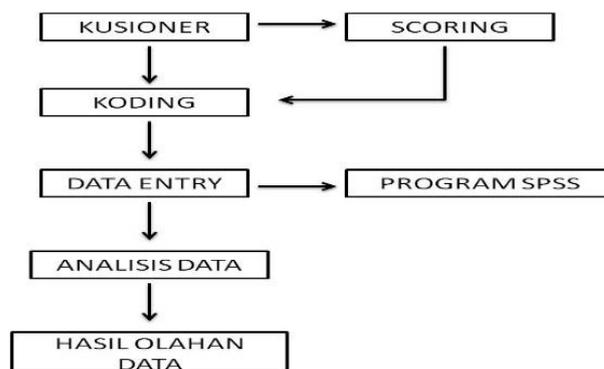
Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat sebagai salah satu unsur pentingnya dalam governance maka untuk mendorong terciptanya *good governance*, organisasi masyarakat selanjutnya memilih isu partisipasi sebagai strategi awal mewujudkan *good governance*. Kenyataan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah hambatan yang dialami organisasi masyarakat menuju partisipasi yang baik dalam program pembangunan, seperti masyarakat yang kurang inisiatif, kurang terorganisir, dan tidak memiliki kapasitas memadai untuk terlibat secara produktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi. Dengan demikian, strategi penguatan institusi lokal merupakan cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesiapan warga berpartisipasi dalam pembangunan.

Menyadari arti pentingnya peran kelembagaan masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kota Makassar, maka pada tahun 2001 Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Daerah Kota Makassar. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dengan tujuan antara lain, 1) meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, 2) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan, 3) meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengolah dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang agrobisnis dan pariwisata, 4) meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Menurut Kepala Bidang Ketahanan Badan Pemberdayaan Masyarakat, secara umum dapat dikatakan bahwa upaya pembangunan yang dilaksanakan di Kota Makassar dewasa ini cukup berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama ini pemerintah telah banyak berperan didalam merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan Kota Makassar, namun tetap dirasakan belum optimal karena dukungan lembaga masyarakat yang rendah. Dengan demikian, peningkatan peran lembaga masyarakat menjadi penting untuk dikaji.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa Tamalanrea sebagai kecamatan yang memiliki kompleksitas permasalahan terutama yang menyangkut mengenai perencanaan pembangunan sehingga dipandang perlu untuk diteliti. Penelitian ini berpusat pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai unit kerja penanggung jawab perencanaan pembangunan ditingkat Kelurahan dan Kecamatan. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kuantitatif deskriptif, Dasar penelitian ini adalah metode survey. Populasi adalah keseluruhan komponen yang menjadi objek penelitian, oleh karena itu yang menjadi objek penelitian adalah Pengurus LPM di Kecamatan Tamalanrea, pemerintahan kelurahan dan masyarakat di Kecamatan Tamalanrea. Teknik penarikan sampel secara purposive. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner, observasi, study kepustakaan dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan studi pustaka dijadikan sebagai data sekunder, sedangkan data yang diperoleh dari kuisisioner dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan program SPSS. Prosedur pengolahan data dimulai dengan pembuatan kuisisioner, menentukan variabel, dimensi, dan indikator-indikator. Setelah itu dilakukan skoring terhadap pilihan-pilihan jawaban.



Gambar 1. Prosedur Pengolahan Data

Berikut skoring terhadap kinerja dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Tabel 1. Rentang Penafsiran Kinerja

Rentang	Penafsiran
1,00 - 1,75	Tidak baik
1,76 - 2,50	Cukup baik
2,51 - 3,25	Baik
3,26 - 4,00	Sangat baik

Tabel 2. Tabel Rentang Penafsiran Faktor Pendukung dan Penghambat

Rentang	Penafsiran
1,00 - 2,50	Penghambat
2,51 - 4,00	Pendukung

Berdasarkan dua tabel tersebut dapat diketahui bahwa penentuan penafsiran berdasarkan hasil rata-rata setiap dimensi. Untuk penilaian kinerja digunakan empat kriteria penilaian yaitu: sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik sedangkan untuk faktor-faktor yang memengaruhinya digunakan dua kriteria penilaian yaitu faktor pendukung dan penghambat. Selanjutnya yaitu melakukan pengkodean kuisisioner (masyarakat, kelurahan, dan pengurus LPM) sebelum proses pengambilan data. Data yang diperoleh dari responden kemudian dikelompokkan berdasarkan variabel kemudian dianalisis menggunakan regresi linear dengan bantuan program SPSS versi 16 untuk mengetahui peranan dan faktor-faktor yang memengaruhi peranan LPM Kecamatan Tamalanrea dalam perencanaan pembangunan di Kota Makassar.

HASIL DAN DISKUSI

Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Secara kuantitatif, deskripsi data didasarkan pada perhitungan frekuensi terhadap skor setiap alternatif jawaban angket, sehingga diperoleh persentase dan skor rata-rata jawaban responden dari masing-masing variabel, dimensi dan indikator.

Tabel 3. Tabel Kinerja LPM Kecamatan Tamalanrea

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kualitas Produk Perencanaan	2.4570	.60648	78
Produktivitas	2.9745	.57135	78
Akuntabilitas	3.1222	.37905	78
Responsif	3.2678	.55605	78

Sumber Data: Hasil Olahan Kuisisioner, 2021

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tamalanrea baik. Hal ini didasarkan pada skor rata-rata masing-masing dimensi yakni: kualitas produk sebesar 2,45, produktivitas sebesar 2,97, akuntabilitas sebesar 3,12 dan responsif sebesar 3,26 berada pada kategori tinggi/baik (2,51 – 3,25). Dari penjabaran di atas dapat dilihat bahwa responsif mempunyai kontribusi yang paling besar yakni berada pada kategori tinggi (3,26 – 4,00) sesuai yang diharapkan. Berikut penjabaran setiap dimensi yang ada pada variabel kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Kualitas Produk Perencanaan

Kualitas produk perencanaan merupakan salah satu dimensi yang dilakukan untuk menilai kinerja pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tamalanrea dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Makassar. Hasil penilaian responden terhadap kualitas produk perencanaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Penilaian Terhadap Kualitas Produk Perencanaan Pengurus LPM

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	4	5,13
2	Cukup baik	40	51,28
3	Baik	29	37,18
4	Sangat baik	5	6,41
	Jumlah	78	100
	Rata-Rata		2,45

Sumber Data: Hasil Olahan Kuisisioner, 2021

Dari tabel 4 diketahui bahwa dominan responden menyatakan kualitas produk perencanaan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kurang baik yaitu 40 orang (51,28 %), selanjutnya yang menyatakan baik sebanyak 29 orang (37,18 %), kemudian yang menyatakan sangat baik sebanyak 5 orang (6,41 %), sisanya sebanyak 4 orang (5,13 %). Sehingga jika dilihat rataannya (2,45) dapat disimpulkan bahwa kualitas produk perencanaan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah baik.

Produktivitas

Pengukuran kinerja pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana produktivitas dalam sebuah organisasi. Pengurus maupun organisasi yang produktif adalah pengurus atau organisasi yang mampu mencapai hasil sesuai rencana serta mampu memanfaatkan sumber daya yang ada baik menggabungkan pemanfaatan semaksimal mungkin dari waktu, dana dan perlengkapan serta keterampilan

yang diperoleh sehingga diperoleh hasil yang sebesar-besarnya dari usaha yang dilakukan dalam rangka menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan, mampu menyatukan orientasi, daya guna, hasil guna, keekonomikan dan kehematan sedemikian rupa.

Tabel 5. Tabel Penilaian Terhadap Produktivitas Pengurus LPM

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	0	0
2	Cukup baik	21	26,92
3	Baik	45	57,69
4	Sangat baik	12	15,38
	Jumlah	78	100
	Rata-rata		2,97

Sumber Data: Hasil Olahan Kuisisioner, 2021

Dari tabel 5 diketahui bahwa dominan responden menyatakan produktivitas pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Baik yaitu 45 orang (57,69 %), selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 21 orang (26,92 %), kemudian yang menyatakan sangat baik sebanyak 12 orang (15,38 %). Sehingga jika dilihat rataannya (2,97) dapat disimpulkan bahwa produktivitas pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah baik.

Responsif

Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harus tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, saran yang disampaikan oleh berbagai kelompok, tuntutan yang diajukan bahkan kritik membangun yang disarankan harus dipertimbangkan dalam membuat perencanaan pembangunan daerah. Tidak tanggap dapat berakibat tidak tertampungnya kebutuhan dan keinginan di daerah yang sama artinya kehilangan kesempatan untuk memperoleh masukan penting. Tabel berikut ini merupakan tanggapan serta penilaian responden tentang kesiapan/respon Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terhadap usulan masyarakat maupun kritikan masyarakat.

Tabel 6. Tabel Penilaian Terhadap Responsif Pengurus LPM

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	0	0
2	Cukup baik	25	32,05
3	Baik	41	52,56
4	Sangat Baik	12	15,38
	Jumlah	78	100
	Rata-rata		3,12

Sumber Data: Hasil Olahan Kuisisioner, 2021

Dari tabel 6 diketahui bahwa dominan responden menyatakan responsif pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Baik yaitu 41 orang (52,56 %), selanjutnya yang

menyatakan cukup baik sebanyak 25 orang (32,05 %), kemudian yang menyatakan sangat baik sebanyak 12 orang (15,38 %). Sehingga jika dilihat rataannya (3,12) dapat disimpulkan bahwa responsif pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah baik.

Akuntabilitas

Proses akuntabilitas berkaitan dengan apakah terdapat prosedural-prosedural yang memadai yang diterapkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tertentu dan dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian disampaikan pada publik, sehingga semua pihak yang berkepentingan mengetahuinya. Jadi, partisipasi semua pihak sangat mendukung lancarnya proses akuntabilitas ini. Untuk mendukung hal itu, maka perlu dilakukan koordinasi diantara seluruh stakeholders yang ada.

Tabel 7. Tabel Penilaian Terhadap Akuntabilitas Pengurus LPM

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	0	0
2	Cukup baik	0	0
3	Baik	62	79,49
4	Sangat Baik	16	20,51
Jumlah		78	100
Rata-rata			3,26

Sumber Data: Hasil Olahan Kuisisioner, 2021

Dari tabel 7 diketahui bahwa dominan responden menyatakan akuntabilitas pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat baik yaitu 62 orang (79,49 %), selanjutnya yang menyatakan sangat baik sebanyak 16 orang (20,51). Sehingga jika dilihat rataannya (3,26) dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah sangat

Faktor yang terpenting yang dapat memengaruhi kinerja adalah etos kerja yang harus dimiliki oleh setiap birokrat dalam melaksanakan fungsi dan tugas administrasinya secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Pembahasan tentang kinerja organisasi dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kinerja individu atau aparat perencana yang memberikan konstibusi besar terhadap kinerja organisasi, atau dengan kata lain dengan bertambah baik kinerja aparat perencana akan mendorong peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan .

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Makassar, diantaranya adalah,

profesionalisme pengurus LPM, data dan informasi yang akurat, sarana dan prasarana, koordinasi, mMotivasi kerja.

Tabel 8. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja LPM

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Profesionalisme	3.3433	.62495	78
Aparat Perencana	3.1233	.46515	78
Data dan Informasi	3.0111	.53417	78
Sarana dan Prasarana	3.1111	.61495	78
Koordinasi	3.5533	.72881	78
Motivasi			

Sumber Data: Hasil Olahan Kuisisioner, 2021

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari lima dimensi yang ada, semua merupakan faktor pendukung kinerja pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tamalanrea. Hal ini didasarkan pada skor rata-rata masing-masing dimensi yakni, profesionalisme sebesar 3,34, data dan informasi 3,12, sarana dan prasaran sebesar 3,01 koordinasi sebesar 3,11, dan motivasi sebesar 3,55 berada pada kategori faktor pendukung (2,51-4,00). Dari penjabaran di atas dapat dilihat bahwa motivasi mempunyai kontribusi yang paling besar. Berikut penjabaran setiap dimensi yang ada pada variabel faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Profesionalisme Pengurus LPM

Profesionalisme yang dimaksud adalah tingkat pemahaman pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terhadap tugas dan fungsinya dimana tingkat pendidikan dan keahlian menjadi faktor pendukung keberhasilan perencanaan pembangunan di Kota Makassar.

Tabel 9. Tabel Penilaian Terhadap Profesionalisme Pengurus LPM

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	0	0
2	Cukup baik	20	27,03
3	Baik	48	64,86
4	Sangat baik	6	8,11
Jumlah		78	100
Rata-rata			3,34

Sumber Data: Hasil Olahan Kuisisioner, 2021

Dari tabel 9 diketahui bahwa dominan responden menyatakan profesionalisme pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Baik yaitu 48 orang (64,86 %), selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 20 orang (27,03), sisanya yang menyatakan sangat baik sebanyak 6 orang (8,11). Sehingga jika dilihat rataannya (3,34) dapat disimpulkan bahwa profesionalisme pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah sangat baik.

Data dan Informasi yang Akurat

Data dan informasi yang akurat yang dimaksud yaitu suatu alat yang digunakan untuk pencapaian hasil pembangunan dan sebagai faktor pendukung utama dalam proses perencanaan pembangunan.

Tabel 10. Tabel Penilaian Terhadap Akurasi Data Dan Informasi Pengurus LPM

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak akurat	0	0
2	Cukup akurat	20	25,64
3	Akurat	28	35,80
4	Sangat akurat	30	38,46
Jumlah		78	100
Rata-rata			3,12

Sumber Data: Hasil Olahan Kuisisioner, 2021

Dari tabel 10 diketahui bahwa dominan responden menyatakan data dan informasi yang diperoleh pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sangat akurat yaitu 30 orang (38,46 %), selanjutnya yang menyatakan akurat sebanyak 28 orang (35,80 %), sisanya 20 orang (25,64) menyatakan cukup akurat. Sehingga jika dilihat rataannya (3,12) dapat disimpulkan bahwa data dan informasi yang diperoleh pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah sangat akurat.

Sarana dan Prasarana

Yang dimaksud sarana dan prasarana yakni alat yang digunakan untuk pencapaian hasil pembangunan dan sebagai faktor pendukung utama dalam membantu kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 11. Tabel Penilaian Terhadap Sarana Yang Dimiliki LPM

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak memadai	0	0
2	Cukup memadai	16	20,51
3	Memadai	48	61,54
4	Sangat memadai	14	17,95
Jumlah		78	100
Rata-rata			3,01

Sumber Data: Hasil Olahan Kuisisioner, 2021

Dari tabel 11 diketahui bahwa dominan responden menyatakan sarana yang ada dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memadai yaitu 48 orang (61,54 %), selanjutnya yang menyatakan cukup memadai sebanyak 16 orang (20,51 %), sisanya 14 orang (17,95) menyatakan sangat memadai. Sehingga jika dilihat rataannya (3,01) dapat disimpulkan bahwa sarana yang ada dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah sangat memadai.

Koordinasi

Yang dimaksud koordinasi yakni mengomunikasikan berbagai hal berkaitan dengan perencanaan pembangunan antar instansi yang terkait.

Tabel 12. Penilaian Terhadap Koordinasi Pengurus LPM

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	0	0
2	Cukup baik	14	17,95
3	Baik	46	58,97
4	Sangat baik	18	23,08
	Jumlah	78	100
	Rata-rata		3,11

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisisioner, 2021

Dari tabel 12 diketahui bahwa dominan responden menyatakan koordinasi antar instansi yang dilakukan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah baik yaitu 46 orang (58,97 %), selanjutnya yang menyatakan sangat baik sebanyak 18 orang (23,08 %), sisanya 14 orang (17,95) menyatakan cukup baik. Sehingga jika dilihat rataannya (3,11) dapat disimpulkan bahwa koordinasi antarinstansi yang dilakukan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah sangat baik.

Motivasi Kerja

Yang dimaksud motivasi kerja yaitu usaha yang dilakukan oleh atasan untuk memberikan ransangan kepada bawahan sehingga mampu mendorong terciptanya iklim kerja yang baik di lingkungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 13. Tabel Penilaian Terhadap Motivasi Kerja Pengurus LPM

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak baik	0	0
2	Cukup baik	24	30,77
3	Baik	41	52,56
4	Sangat baik	13	16,67
	Jumlah	78	100
	Rata-rata		3,55

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisisioner, 2021

Dari tabel 13 diketahui bahwa dominan responden menyatakan motivasi kerja yang diberikan kepada pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah baik yaitu 41 orang (52,56 %), selanjutnya yang menyatakan sangat baik sebanyak 13 orang (16,67 %), sisanya 13 orang (16,67) menyatakan cukup baik. Sehingga jika dilihat rataannya (3,55) dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja yang diberikan kepada pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah sangat baik.

Hubungan antara Faktor yang Bepengaruh terhadap Kinerja LPM

Tabel 14. Regresi Faktor Terhadap Kinerja LPM

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.740 ^a	.665	.342	3.09117	.365	16.080	1	76	.000

a. Predictors: (Constant), LPM

b. Dependent Variable: Faktor yang Mempengaruhi

Sumber Data: Hasil Olahan Kuisisioner, 2021

Analisis Hipotesis :

Ho : Tidak ada Pengaruh antara faktor-faktor terhadap kinerja LPM

Ha : Ada pengaruh faktor-faktor terhadap kinerja LPM

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada kolom signifikan dengan nilai 0.000. untuk menguji hipotesis yang diajukan apakah diterima atau ditolak dengan melihat signifikansi. Adapun ketentuan penerimaan atau penolakan apabila signifikansi dibawah atau sama dengan 0.05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Berdasarkan tabel pengelolaan SPSS maka diketahui bahwa nilai Sig.F = 0.000 < 0.05 ini berarti Ha diterima dan H0 ditolak. r hitung sebesar 0,740 dan r tabel sebesar 0,227 dan ternyata r hitung lebih besar dari r tabel dengan demikian signifikan dan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Selanjutnya nilai R square (koefisien determinasi dipergunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independent terhadap perubahan variabel dependent. Artinya ada pengaruh variabel independent terhadap dependent R Square sebesar 0.665 yang berarti bahwa 66.5% variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja LPM.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dengan skor rata - rata 2,95. Secara umum tingkat responsif dan akuntabilitas sudah berjalan dengan baik namun dari segi kualitas perencanaan dan produktivitas pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat masih rendah jika dibandingkan dengan akuntabilitas dan responsif. Sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pengurus Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat adalah profesionalisme pengurus pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan skor 3,34, akurasi data dan informasi dengan skor 3,34, sarana dan prasarana dengan skor 3,01, koordinasi dengan instansi dengan skor 3,11, dan motivasi pengurus dengan skor 3,55. Sehingga setelah dianalisis menggunakan regresi linear maka faktor-faktor tersebut secara bersama-sama memengaruhi kinerja Lembaga Pemberdayaan sebesar 66,5%. Oleh karena itu, disarankan agar sumberdaya LPM lebih ditingkatkan lagi kualitasnya sehingga kualitas produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan juga akan semakin baik, mengawal usulan rencana yang dihasilkan di Kecamatan hingga menjadi ketetapan Musrembang agar lebih meningkatkan produktivitasnya.

REFERENSI

- Aristo. (2004) *Rejuvinasi Perencanaan dalam Menghadapi Era Perencanaan Partisipatif "Sebuah Tahapan Awal dalam Pembentukan Kultur Masyarakat Partisipatif"*. Disampaikan dalam: Seminar Tahunan ASPI (Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia) Universitas Brawijaya, Malang.
- Bastian, Indra. (2006). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Buku Pedoman Pola Pembangunan Kemitraan Masyarakat (P2KM) Kota Makassar. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar.
- Djaenuri, Aries. (2010). *Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Fakih, Mansour. (2009). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Jakarta: Insist Press.
- Irawan, Prasetya. (2000). *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Syarifin, Pipin dan Debah Jubaedah. (2005). *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suzetta. (2007). *Perencanaan Pembangunan Indonesia*. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS.
- Tarigan, Robinson. (2004). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.